****

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN NGADA**

**TERHADAP**

**NOTA KEUANGAN  
RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN NGADA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

* **Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh**
* **Salam sejahtera bagi kita semua,**
* **Om Swastiastu**
* **Namo Buddhaya,**
* **Salam Kebajikan.**
* **Yang Terhormat Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada**
* **Yang Terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada**
* **Yang Terhormat Bapak-Bapak Wakil Ketua Serta Bapak-Bapak Anggota DPRD Kabupaten Ngada**
* **Bapak-Bapak Anggota Forkompimda Kabupaten Ngada**
* **Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada**
* **Bapak-Bapak Asisten Bupati Ngada**
* **Bapak/Ibu Pimpinan Perangkat Daerah**
* **Bapak Ibu Sekretaris Dewan**
* **Para tenaga Ahli Fraksi dan Sekretaris Pimpinan**
* **Para wartawan, media massa dan hadirin serta segenap warga masyarakat kabupaten Ngada yang fraksi Golkar banggakan.**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional, termasuk dalam agenda pembahasan terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD kabupaten ngadatahun anggaran 2025.

**Hadirin Sidang Paripurna yang Terhormat,**

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati Ngada beserta jajaran eksekutif yang telah menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan amanat **Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** serta **Permendagri Nomor 15 Tahun 2024** tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kami memahami bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD merupakan konsekuensi logis dari dinamika ekonomi nasional, kebijakan transfer ke daerah, serta kebutuhan daerah yang mendesak dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ngada yakni *“Ngada Unggul, Mandiri, dan Berbudaya berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”*.

Sejalan dengan itu, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas berbagai langkah dan kebijakan yang telah ditempuh, antara lain:

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga konsistensi arah pembangunan meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
2. Fokus kebijakan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, pengembangan pariwisata pedesaan, serta penguatan UMKM.
3. Komitmen yang ditunjukkan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan jaminan kesehatan, peningkatan akses pendidikan, serta upaya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
4. Perhatian serius terhadap penataan tata ruang kota Bajawa, pembangunan sarana dan prasarana dasar, serta penguatan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas masyarakat Ngada.

Meskipun berbagai capaian dan komitmen Pemerintah Daerah patut diapresiasi, namun Fraksi Partai Golkar memandang bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius agar pelaksanaan Rancangan Perubahan APBD benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Fraksi Golkar perlu menyampaikan beberapa catatan penting:

**1. Bidang Pendapatan Daerah**

* **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** memang meningkat menjadi Rp71,5 miliar, namun masih relatif kecil dibandingkan total kebutuhan belanja. Hal ini menunjukkan **ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat (lebih dari 90%)**.
* Penurunan signifikan pada **penerimaan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah** perlu mendapat perhatian serius. Fraksi Golkar menilai masih kurangnya optimalisasi aset daerah serta lemahnya penegakan kepatuhan wajib pajak/retribusi.  
  **Masukan:**Perlu adanya digitalisasi retribusi pajakdan meminimalisir sehingga tidak terjadinya penyimpangan
* Perlu inovasi kebijakan daerah berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian organik, energi terbarukan).
* Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi agar transparan dan mengurangi kebocoran.
* Optimalisasi BUMD dan kerjasama strategis dengan pihak swasta/mitra investor.

**2. Bidang Belanja Daerah**

* Fraksi Golkar mencatat adanya **penurunan belanja modal** sebesar Rp12,5 miliar, khususnya pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Padahal infrastruktur dasar menjadi kebutuhan vital masyarakat pedesaan.
* Sementara itu, **belanja barang dan jasa meningkat cukup besar** hingga Rp23,8 miliar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran yang seharusnya lebih diarahkan pada belanja produktif.  
  **Catatan:**
* Kenaikan belanja operasional yang tidak seimbang dengan belanja pembangunan dapat mengurangi dampak langsung bagi masyarakat.
* Perlu adanya evaluasi mendalam terkait efektivitas hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran, mengingat terjadi penurunan signifikan belanja bansos.

**3. Bidang Program Prioritas**

* Program “Kota Terang” dan penataan Bajawa sebagai kota bunga patut diapresiasi, namun **jangan sampai menggeser prioritas utama pembangunan pedesaan** yang berkaitan dengan air bersih, sanitasi, pendidikan, dan ketahanan pangan.
* Fraksi Golkar menilai bahwa pengembangan pariwisata harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM lokal serta regulasi perlindungan budaya agar tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga menjaga jati diri masyarakat Ngada.

**4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**

* Fraksi Golkar menekankan perlunya **penempatan birokrat sesuai kompetensi dan merit system** agar reformasi birokrasi tidak sebatas wacana.
* Pemberian insentif pegawai dan RT harus berbasis kinerja, transparan, dan terukur, bukan sekadar tambahan belanja rutin.
* Pengembangan SDM Para kepala Desa dan Perangkat desa, serta BPD melalui Pelatihan dan peningkatan kapasitas serta monev yang rutin dan terukur. Fraksi meyakini, semakin Desa dan Keluarahan dikelola dengan manejemen yang baik, semakin baik juga nama Kabupaten Kabapaten Ngada pada Masa yang akan datang.

Fraksi Partai Golkar memahami bahwa penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta **Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025**. Namun demikian, setelah mencermati ringkasan APBD, Fraksi menilai terdapat sejumlah catatan penting yang patut dikritisi agar pengelolaan APBD benar-benar efektif, rasional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

**Hal-hal yang tidak masuk akal/kontradiktif**

1. **PAD meningkat, tetapi komponen utama justru menurun drastis.**
   * Total PAD naik Rp **6,9 miliar**, tetapi **Pajak Daerah** turun Rp 1 miliar, **Retribusi** turun Rp 421 juta, dan **Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** turun Rp 1,7 miliar.
   * Kenaikan besar justru ditopang oleh pos “**Lain-lain PAD yang Sah**” yang melonjak Rp **10 miliar**.

👉 *Pertanyaan*: Apakah sumber PAD “lain-lain” ini realistis, transparan, dan berkelanjutan? Mengapa pos utama PAD justru menurun?

1. **Pendapatan Transfer dari Pusat turun sangat signifikan.**
   * Turun Rp **67,2 miliar**, sementara Transfer Antar Daerah hanya naik Rp 3,8 miliar.  
     👉 *Catatan*: Penurunan ini berimplikasi langsung pada pembiayaan pembangunan. Apakah Pemda sudah menyiapkan langkah antisipasi?
2. **Belanja Barang dan Jasa naik Rp 23,8 miliar, tetapi Belanja Pegawai justru berkurang Rp 15,3 miliar.**

👉 *Tidak konsisten*: Bagaimana mungkin belanja rutin pegawai ditekan, sementara belanja barang/jasa justru melonjak besar? Apakah belanja barang/jasa tersebut benar-benar prioritas?

1. **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dipangkas Rp 41,9 miliar, sementara Belanja Gedung dan Bangunan justru melonjak Rp 31,1 miliar.**  
   👉 *Catatan*: a).Infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi adalah kebutuhan masyarakat luas. Mengapa justru dikurangi, sedangkan pembangunan gedung malah ditambah besar? B). Apresiasi terhadap terhadap kinerja pemerintah atas telah beroprasinya Puskesmas Ngara sebagai bentuk perhatin pemerintah pada bidang kesehatan, namun kami menekankan atensi lebih lanjut pada infrastruktur dasar jalan masuk dan fasilitas air bersih pada lokasi tersebut.
2. **Defisit meningkat tajam, tetapi ditutup dengan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang melonjak sangat tinggi.**
   * Defisit bertambah Rp **57,2 miliar**.
   * Ditutup dengan SILPA yang sebelumnya Rp 22,4 miliar, naik jadi Rp 79,7 miliar.  
     👉 *Tidak logis*: SILPA seharusnya mencerminkan efisiensi anggaran tahun sebelumnya. Lonjakan sebesar Rp 57 miliar patut dipertanyakan validitas dan sumber perhitungannya.

**Hadirin Sidang Paripurna yang Terhormat,**

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, Fraksi Partai Golkar mencatat adanya koreksi kenaikan sebesar Rp10.000.000.000.(satu miliar) Namun demikian, Fraksi Golkar tidak menemukan penjelasan yang rinci mengenai sumber pendapatan sebesar Rp5.206.925.920. Dalam Nota Keuangan, pemerintah daerah hanya menyebutkan adanya penerimaan yang berasal dari pengembalian kelebihan belanja hibah oleh KPU dan Bawaslu sebesar Rp4.849.040.141, namun tanpa uraian yang lebih terperinci mengenai komponen tersebut.

Seharusnya alokasi dana hibah kepada kedua lembaga ini bersifat terukur dan jelas, karena mengikuti tahapan Pemilu yang ketat serta sudah direncanakan dengan baik. Fakta bahwa masih terdapat sisa anggaran dalam jumlah yang demikian besar menunjukkan bahwa perencanaan anggaran hibah tersebut tidak akurat, tidak cermat, bahkan terkesan asal-asalan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa sisa anggaran sebesar ini tidak dapat diprediksi sejak awal? Apakah terdapat indikasi adanya perencanaan yang dilebih-lebihkan (overbudgeting)?

Lebih jauh, Fraksi juga menilai bahwa laporan mengenai pengembalian belanja tersebut tidak disertai dengan penjelasan rinci. Tidak ada uraian yang jelas mengenai kegiatan apa, pos anggaran mana, serta alasan terjadinya kelebihan belanja. Hal ini menimbulkan keraguan atas akuntabilitas penggunaan dana hibah, padahal dana tersebut seharusnya dikelola dengan penuh ketelitian dan transparansi.

Selain itu, Fraksi mencermati bahwa pos **Lain-lain PAD yang Sah** justru melonjak lebih dari 160% semata-mata karena adanya pengembalian dana hibah dan denda. Kondisi ini memberi kesan bahwa pos “lain-lain” dijadikan sebagai ruang parkir atau bahkan “tong sampah anggaran” untuk menutupi kelemahan dalam manajemen keuangan daerah.

Kembalinya dana miliaran rupiah dari KPU dan Bawaslu tanpa penjelasan detail juga berpotensi melecehkan prinsip transparansi. Pemilu adalah peristiwa besar yang mendapat sorotan publik sangat tinggi, sehingga wajar jika masyarakat kemudian bertanya-tanya: mengapa dana sebesar ini baru diketahui setelah audit, bukan sejak awal perencanaan? Kesimpangsiuran informasi ini semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Jika benar terdapat sisa hibah dalam jumlah miliaran rupiah, seharusnya sejak awal dapat diantisipasi dan diarahkan kembali untuk mendukung kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan jalan, irigasi, peningkatan layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Ironisnya, pada saat yang sama, anggaran bansos justru dipangkas, alokasi jalan dan irigasi dipotong, sementara hasil kelebihan hibah hanya masuk ke pos abstrak “lain-lain PAD” yang kurang memiliki arah dan sasaran yang jelas.

Kemudian disisi lain fraksi golkar mencermati adanya asumsi pemerintah yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari denda keterlambatan pekerjaan. Menurut Fraksi Golkar, denda keterlambatan sesungguhnya bukan merupakan instrumen peningkatan PAD, melainkan konsekuensi dari adanya ketidakpatuhan pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan fisik. Idealnya, setiap kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan tepat kualitas, tepat volume, serta tepat waktu.

Oleh karena itu, Fraksi Golkar menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan strategi yang elegan, produktif, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan PAD. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain: optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja pengelolaan aset daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kearifan budaya dan pariwisata, serta perluasan kerja sama investasi yang sehat dan transparan. Dengan demikian, peningkatan PAD akan tercapai melalui upaya yang terukur, berkelanjutan, dan tidak sekadar bergantung pada denda keterlambatan pihak ketiga.

**Hadirin Sidang Paripurna yang Terhormat**

Dengan demikian, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa lonjakan **Lain-lain PAD yang Sah** akibat pengembalian dana hibah KPU dan Bawaslu adalah indikasi nyata lemahnya perencanaan, minimnya akurasi penganggaran, dan tidak transparannya pengelolaan dana publik. Fraksi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan penjelasan terbuka dan rinci mengenai sumber kelebihan hibah tersebut. Mekanisme pengembalian harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas dari KPU dan Bawaslu. Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa pos “lain-lain” tidak boleh dijadikan kotak hitam anggaran yang hanya akan memperlemah akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Fraksi Golkar meminta agar Pemerintah Daerah memberikan penjelasan rinci, memeberikan data pendukung yang akurat, serta justifikasi kebijakan atas poin-poin di atas, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas APBD yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar dengan tegas menyatakan menerima kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,namun dengan catatan harus ada penjelasan normatif dengan adanya data rinci dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka di hadapan rakyat. Serta lebih berani melakukan inovasi pendapatan, efisiensi belanja, serta penguatan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sebelum menutup pemandangan umum ini, Fraksi Golkar ingin menyampaikan agar ada penegasan kebijakan dan sikap pemerintah dalam proses penyelesaian tanah bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu, hal yang penting untuk diperbaiki adalah penggunaan istilah “Saudara Pimpinan Rapat Paripurna” dalam naskah Nota Keuangan.Penggunaan kata “saudara”kepada pimpinan DPRD sebagai pemimpin rapat, **tidak selalu salah**, tetapi perlu diperhatikan konteks dan tingkat formalitas acara. Fraksi memandang bahwa cara penyebutan tersebut kurangnya penghormatan kepada DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Fraksi meminta agar Pemerintah Daerah lebih berhati-hati dalam penyusunan dokumen resmi, sehingga tidak terulang kembali penggunaan kalimat yang mereduksi kehormatan kelembagaan DPRD.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya demi terwujudnya *Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.*

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Bajawa, 27 Agustus 2025**

**Fraksi Partai Golkar   
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **ATANASIUS H. WATUNGADHA** | **KETUA** |  |
| **2** | **ANTONIUS NO GILI, S.Pd** | **WAKIL KETUA** |  |
| **3** | **ALEXANDER Y. SONGKARES, S.Ip** | **SEKRETARIS** |  |
| **4** | **ROMILUS JUJI, ST** | **ANGGOTA** |  |
| **5** | **AURELIUS ROPA, S.Sos** | **ANGGOTA** |  |